



Buku Saku

LAPORAN KEUANGAN DAN PAJAK YAYASAN SOSIAL



Disusun oleh:
Shandy Jannifer Matitaputty, dkk

BUKU SAKU
LAPORAN KEUANGAN DAN
PAJAK YAYASAN SOSIAL

Shandy Jannifer Matitaputty

Agnes Arie Mientarry Christie

Paulina Rini Hastuti

Agung Sugiarto

Apelina Teresia

Mardika Mariana

Feronika Roseling Lalang

BUKU SAKU LAPORAN KEUANGAN DAN PAJAK YAYASAN SOSIAL

Penulis :

Shandy Jannifer Matitaputty, S.E., M.Si

Agnes Arie Mientarry Christie, S.E., M.Si., BKP

Paulina Rini Hastuti, S.E., M.Si

Agung Sugiarto, S.E., M.M., M.Ec.Dev., Akt., CA., CPA., MAPPI (Cert)., CRBC

Apelina Teresia, S.Ak., M.Ak

Mardika Mariana

Feronika Roseling Lalang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam, atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis dan Penerbit. ©Universitas Katolik Soegijapranata 2024

ISBN :

Perwajahan Isi : Hartoyo SP

Ukuran buku : A6

Font : Segoe Condensed 11

Tanggal Terbit : November 2022

PENERBIT:

Universitas Katolik Soegijapranata

Anggota APPTI No.003.072.1.1.2019

Anggota IKAPI No 209/ALB/JTE/2021

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234

Telepon (024)8441555 ext. 1409

Website: www.unika.ac.id

Email Penerbit: ebook@unika.ac.id

PRAKATA

Buku Saku Laporan Keuangan dan Pajak Yayasan Sosial merupakan buku yang disusun oleh tim Program Studi Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata. Buku saku ini mencakup pelatihan Laporan Keuangan dan Perpajakan dengan contoh dari Yayasan Sosial Bahtera Kasih Kota Semarang. Sehingga buku ini lebih fokus membahas pada kebutuhan Yayasan Bahtera Kasih mengenai pelaporan keuangan (pembukuan) serta penyiapan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT PPh Tahunan).

Buku saku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Yayasan Sosial yang lain karena dilengkapi dengan materi dan pengelolaan laporan keuangan sampai dengan tata cara penyiapan pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT PPh Tahunan). Tim Penulis dari Program Studi Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Sosial Bahtera Kasih Kota Semarang yang menjadi mitra Program Studi Perpajakan Universitas Katolik Soegijapranata. Semoga buku saku ini dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

Semarang, Oktober 2023

Tim Penulis

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Kendala Laporan Keuangan Dan Perpajakan Yayasan Sosial	3
Laporan Keuangan Bagi Yayasan Sosial Perpajakan Yayasan Sosial	5 11
PPh Badan	15
SPT Tahunan	23
Contoh Kasus	25
Mencatat Transaksi dalam Jurnal Umum	29
Memindahkan Ayat Jurnal ke dalam Buku Besar	41
Membuat Laporan Penghasilan Komprehensif	47
Membuat Laporan Perubahan Aset Neto	51
Membuat Laporan Arus Kas	55
Membuat Laporan Posisi Keuangan	59
Contoh Laporan SPT Tahunan Badan	65
Penutup	75
Daftar Pustaka	77
Lampiran SPT	79

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

PENDAHULUAN

Yayasan Sosial merupakan salah satu bentuk entitas nirlaba. Pada entitas nirlaba ini aktivitas operasionalnya tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Sementara itu terkait pengeluaran operasional yayasan, pada umumnya sumber pemasukan utama masih berasal dari para donatur. Hal ini menunjukkan aktivitas Yayasan yang bergerak pada motif non ekonomi

Sebagai lembaga yang berbadan hukum, Yayasan Sosial wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini berarti yayasan tersebut memiliki kewajiban pembukuan dan pelaporan pajak. Pembukuan dalam hal ini berarti bahwa Yayasan Sosial perlu menyusun dan menerbitkan laporan keuangan untuk selanjutnya dilampirkan pada SPT Tahunan PPh Badan. Sedangkan kewajiban pelaporan pajak yang juga harus dipenuhi adalah kewajiban dalam menghitung menyetor dan melaporkan pajak.

Terkait dengan kewajiban pembukuan dan pelaporan pajak, Yayasan seringkali dihadapkan pada keterbatasan pemahaman, pengetahuan, dan kemampuan pegawai. Hal ini semakin diperberat dengan keterbatasan keuangan untuk melakukan

pengembangan SDM. Pengembangan SDM sebenarnya dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan Yayasan termasuk pelatihan keuangan dan perpajakan Yayasan. Salah satu jalan yang biasanya dipakai oleh Yayasan/ badan-badan nirlaba untuk mengatasi persoalan kewajiban pembukuan dan perpajakan, alih-alih pengikutkan pegawainya dalam pelatihan adalah penggunaan konsultan pajak.

Penggunaan konsultan secara ekonomi dapat memunculkan biaya tersendiri. Disisi lain, apabila dikaji lebih dalam kewajiban Perpajakan Yayasan cenderung masih sederhana. Hal ini karena aktivitas-aktivitas Yayasan yang cenderung terpola dan bersifat non profit. Hal ini pun sama seperti yang didapati oleh tim pengabdian di Yayasan Bahtera Kasih. Yayasan ini mengalami kendala yang sama seperti pada umumnya Yayasan sosial dan menggunakan konsultan pajak untuk membantu pelaporan pajaknya.

Buku saku ini berisi panduan Laporan Keuangan dan Perpajakan bagi Yayasan Sosial. Keberadaan buku saku ini diharapkan dapat menolong Yayasan Sosial untuk mampu melaporkan pajaknya sendiri.

KENDALA LAPORAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN YAYASAN SOSIAL

Secara garis besar permasalahan Yayasan Sosial dikelompokkan ke dalam 2 aspek yaitu:

- 1. Permasalahan terkait pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.*

Permasalahan terkait pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang utama pada Yayasan Sosial umumnya disebabkan karena pengurus Yayasan hanya memahami konsep pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara sederhana saja. Hal ini mengindikasikan pengurus Yayasan masih belum dapat membedakan klasifikasi aset neto terikat dan tidak terikat.

- 2. Permasalahan terkait kewajiban pelaporan perpajakan.*

Permasalahan terkait kewajiban perpajakan disebabkan karena masih awamnya para pegawai Yayasan dengan jenis-jenis pajak yang sangat beragam dan perhitungannya yang berbeda atas setiap jenis pajak. Selain itu pada umumnya pengurus

Yayasan belum mengerti bahwa penerimaan Yayasan yang berasal dari sumbangan bukanlah merupakan objek pajak.

LAPORAN KEUANGAN BAGI YAYASAN SOSIAL

Penyusunan laporan keuangan Yayasan didasari dengan pemahaman terkait pentingnya laporan keuangan. Laporan keuangan sangat penting sebagai bagian dari pertanggungjawaban pihak yayasan kepada para donatur dan juga masyarakat umum. Oleh karena itu laporan keuangan menjadi wujud akuntabilitas dan transparansi bagi seluruh entitas, tidak terkecuali entitas non laba. Pelaporan keuangan yayasan sosial berpedoman pada ISAK 35 yang mengatur mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba. Menurut ISAK 35, laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas non laba antara lain yaitu

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, serta aset neto. Perbedaan neraca entitas non laba dengan entitas bisnis terletak pada bagian aset neto. Aset neto merupakan selisih dari aset dikurangi liabilitas. Aset neto dapat dibedakan menjadi Aset Neto Tanpa Pembatasan (*without restrictions*) dan Aset Neto Dengan Pembatasan (*with restrictions*).

- Aset neto tanpa pembatasan adalah aset neto yang tidak dilakukan pembatasan terhadap aset tersebut, misalnya sumbangan yang diberikan oleh donator bebas digunakan untuk berbagai macam kebutuhan entitas.
- Aset neto dengan pembatasan adalah aset neto yang diberikan untuk tujuan tertentu, misalnya sumbangan yang diberikan oleh donator hanya boleh digunakan untuk pembangunan gedung. Aset neto dengan pembatasan dibedakan kembali menjadi aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer.
- Pembatasan permanen: adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, namun organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
- Pembatasan temporer: adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

2. *Laporan Penghasilan Komprehensif*

Menyediakan informasi mengenai ringkasan pendapatan dan beban dalam suatu periode waktu tertentu. Melalui laporan ini, maka dapat dilihat bagaimana kinerja ekonomi suatu entitas selama periode tertentu. Jika pendapatan lebih besar daripada beban yang terjadi maka disebut surplus atau laba neto. Namun, jika pendapatan lebih kecil dari beban maka disebut defisit atau rugi neto.

3. *Laporan Aktivitas*

Menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban. Selain itu laporan aktivitas juga menyajikan jumlah perubahan aset bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode.

4. *Laporan Arus Kas*

Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas

pendanaan. Informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan yayasan dalam menghasilkan kas.

5. *Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan lainnya. CALK menyediakan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menampilkan rincian aset, liabilitas, dan aset neto.

Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sebuah Yayasan Sosial tidak terlepas dari kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak, yang salah satu komponen bagian didalamnya adalah lampiran laporan keuangan. Isi dari laporan keuangan yang wajib disampaikan dalam SPT adalah berupa Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Laporan Laba Rugi (Laporan Penghasilan Komprehensif).

Mengingat kebutuhan praktis dari Yayasan Sosial, serta keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyusun laporan keuangan, maka dalam buku ini contoh aplikasi penyusunan laporan keuangan

yang diberikan adalah sampai dengan tersajinya Neraca (Laporan Posisi Keuangan) dan Laporan Laba Rugi (Laporan Penghasilan Komprehensif) saja. Contoh kasus penyusunan laporan keuangan sejak mulai dari penyusunan jurnal transaksi, posting ke buku besar sampai dengan penyajian dalam Neraca dan Laporan Laba-Rugi dapat dilihat pada bagian Lampiran.

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

PERPAJAKAN YAYASAN SOSIAL

Setelah mengetahui penyusunan laporan keuangan yang benar bagi entitas non laba maka Yayasan perlu memahami perpajakan bagi Yayasan. Perpajakan yayasan meliputi Pajak Penghasilan (PPh) badan bagi Yayasan dan pajak penghasilan potongan dan pungutan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Yayasan. Selain digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, laporan keuangan juga harus dilampirkan saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan. Dalam menyusun SPT Tahunan Badan bagi Wajib Pajak Yayasan, terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu penerimaan Yayasan terbagi menjadi penerimaan yang merupakan Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak.

Penerimaan Yayasan yang Bukan Merupakan Objek Pajak antara lain berasal dari :

- Bantuan atau sumbangan baik dari lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi.
- Harta hibahan sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima.

- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

Sedangkan penerimaan Yayasan yang merupakan Objek Pajak antara lain berasal dari:

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa.
- Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya.
- Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah.
- Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.

Apabila setelah penerimaan dikurangi biaya terdapat sisa lebih (surplus) yang diperoleh Yayasan, maka sisa lebih tersebut dapat dikecualikan dari objek PPh dengan syarat digunakan untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana sosial

dan/atau keagamaan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah sisa lebih tersebut. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana serta pengalokasian dalam bentuk dana abadi dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh.

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

PPh BADAN

Yayasan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPh Pemotongan dan/atau Pemungutan. Adapun transaksi yang berkaitan dengan PPh Pemotongan dan/atau Pemungutan bagi Wajib Pajak Yayasan antara lain yaitu

- 1. PPh 21 atas gaji karyawan tetap dan pegawai lepas.*

Pada contoh Yayasan Bahtera Kasih, Yayasan ini memiliki pegawai tetap dan pegawai lepas yang membantu operasional sehari-hari. Walaupun selama ini PPh 21 yang dibayar selalu NIHIL karena gaji atau upah yang diberikan tidak melebihi PTKP, namun ada kewajiban untuk melaporkan PPh 21 tahunan bagi karyawan tetap. Oleh karena itu diberikan pelatihan mengenai langkah penghitungan PPh 21 bagi karyawan agar pengurus juga dapat melakukan penghitungan pajak dengan benar.

Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap

Penghasilan Bruto

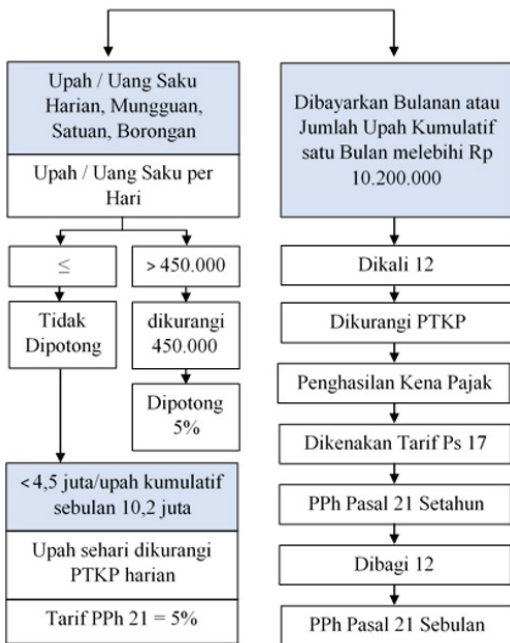


Pegawai Tetap
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja
Dikurangi Dengan
Biaya Jabatan luran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri



Penghasilan Neto (Setahun/Disetahunkan)
Dikurangi: PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17

Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas



2. PPh 23 atas Jasa atau Sewa

Pada contoh Yayasan Bahtera Kasih, Yayasan ini belum pernah bertransaksi terkait sewa maupun jasa yang dikenakan PPh Pasal 23. Namun peluang untuk melakukan transaksi tersebut sangat mungkin terjadi di masa depan. Konsep PPh 23 dapat dilihat pada diagram berikut:



3. PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan

Selain PPh Pasal 23, Yayasan juga sangat dimungkinkan untuk melakukan sewa atas tanah dan bangunan yang merupakan objek pajak PPh Pasal 4 Ayat 2. Konsep PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilihat pada diagram berikut :

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Objek	DPP	Tarif
Persewaan tanah dan/atau bangunan	Bruto	10%

Karakteristik

Tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang
Pengeluaran dalam memperoleh penghasilan atau objek PPh Final yang bersangkutan tidak boleh dibayarkan secara fiskal
Penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam perhitungan PPh dalam SPT Tahunan karena pemenuhan kewajiban perpajakan objek PPh Final tersebut sudah dianggap tuntas

4. PBB

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum seperti ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan (yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan) bukan merupakan objek PBB. Dengan demikian maka Yayasan sebagai badan sosial yang tidak mencari keuntungan juga tidak dikenakan PBB. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh para pengurus Yayasan untuk mengajukan pembebasan PBB:

Tata Cara Pengajuan Pembebasan PBB bagi Yayasan di Kota Semarang
Persyaratan
FC SPPT PBB tahun berjalan Surat kuasa bermaterai FC KTP yang diberi kuasa

Dokumen Pendukung

WP Badan : FC SPT tahunan terakhir dan laporan keuangan

FC pelunasan PBB tahun sebelumnya

FC Kartu Keluarga

FC rekening listrik, telepon, RAM bulan terakhir

FC SK Pengurangan terakhir bila pernah mengajukan

FC SPPT PBB tahun berjalan

Surat kuasa bermaterai

FC KTP yang diberi kuasa

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

SPT TAHUNAN

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Berdasarkan UU KUP Pasal 3 ayat (3a), Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak. Keterlambatan atas pelaporan SPT Tahunan Badan akan dikenakan denda administratif sebesar Rp 1.000.000,- Formulir SPT Tahunan Badan dinamakan formulir SPT 1771. Oleh karena itu, Yayasan sebagai wajib pajak badan wajib melaporkan SPT Tahunan Badan formulir 1771.

Formulir SPT 1771, terdiri dari formulir SPT Induk dan 6 lampiran. SPT Induk menampilkan detail SPT yaitu informasi wajib pajak, jumlah penghasilan, jumlah PPh terutang, jumlah PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, serta jumlah PPh yang kurang atau lebih bayar. Adapun 6 lampiran dalam SPT adalah sebagai berikut:

- 1. Lampiran I berisi perhitungan penghasilan neto fiskal*
- 2. Lampiran II berisi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial*

3. *Lampiran III berisi kredit pajak dalam negeri.*
4. *Lampiran IV berisi rincian PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak*
5. *Lampiran V berisi daftar pemegang saham atau pemilik modal serta daftar susunan pengurus komisaris*
6. *Lampiran VI berisi daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham atau perusahaan afiliasi, serta daftar piutang kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi*

CONTOH KASUS

Contoh Transaksi

Tanggal	Transaksi
5 Januari	Diterima bantuan dana dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 70.000.000,- dengan syarat penggunaan 60% untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anak-anak asuh
6 Januari	Diterima sumbangan dari Ikatan Alumni dana sejumlah Rp 8.000.000,- untuk pengembangan fasilitas dapur di lingkungan panti asuhan
7 Januari	Dibayarkan gaji staf dan karyawan sebesar RP 9.000.000,-
11 Januari	Yayasan menyelenggarakan kegiatan seminar pendidikan yang dilaksanakan di Hotel Indah dengan total biaya yang dibayarkan pada pihak hotel sebesar Rp 4.500.000,- (pembicara atau pemateri tidak dibayar gratis)

12 Januari	Diterima yang pendaftaran dari peserta seminar pendidikan sebesar Rp 2.000.000
13 Januari	Yayasan membeli tunai sebuah motor untuk kendaraan operasional senilai Rp 10.000.000,-
15 Januari	Dibayarkan tunai biaya sewa gedung sebagai kantor sekretariat yayasan untuk 2 tahun kedepan, total biaya sewa Rp 15.000.000,-
20 Januari	Diterima sumbangan dari perkumpulan alumni yayasan sebesar Rp 50.000.000,- dan tidak dibatasi penggunaannya (sepanjang untuk kegiatan yayasan)
23 Januari	Dibayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar Rp 15.000.000,-
25 Januari	Dibeli alat tulis kantor untuk perlengkapan administrasi yayasan 2 bulan kedepan sebesar Rp 2.000.000,-
30 Januari	Mengadakan rapat pertemuan dengan dinas sosial dengan total biaya Rp 3.000.000,-

31 Januari	Menerima sumbangan berupa 2 unit komputer dari donatur perusahaan dengan perkiraan nilai sebesar Rp 9.000.000,- Komputer tersebut ditujukan untuk mendukung pendidikan anak asuh
------------	--

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

MENCATAT TRANSAKSI DALAM JURNAL UMUM

Sebuah transaksi awalnya dimasukkan dalam catatan yang disebut dengan jurnal. Sehingga proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal dinamakan menjurnal atau *journalizing*.. Adapun langkah-langkah menjurnal adalah sebagai berikut :

1. *Memasukkan tanggal transaksi ke dalam kolom tanggal*
2. *Menuliskan nama akun yang didebit pada kolom akun dan jumlah yang didebit dimasukkan pada kolom debit.*
3. *Sementara nama akun yang dikredit ditulis dibawahnya dengan tulisan agak menjorok ke kanan dan jumlah yang dikredit dimasukkan pada kolom kredit.*
4. *Pastikan bahwa jumlah debit sama dengan kredit*

Selama bulan Januari 20x1, Yayasan ABC memiliki 12 transaksi yang dicatat ke dalam jurnal dengan penjelasan sebagai berikut:

Transaksi 5 Januari. Diterima bantuan dana dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 70.000.000,- dengan syarat penggunaan 60% untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anak-anak

Pendapatan sumbangan dari Pemerintah Daerah yang termasuk dalam pendapatan sumbangan dengan pembatasan yaitu sebesar 60% dari total sumbangan atau sebesar Rp 42.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 28.000.000,- merupakan pendapatan sumbangan tanpa pembatasan. Maka kedua akun pendapatan sumbangan tersebut akan menambah di sisi kredit. Sementara kas akan bertambah sebesar Rp 70.000.000,- di sisi debit

Pendapatan sumbangan dari Pemerintah Daerah

= Rp 70.000.000,-

Pendapatan sumbangan dengan pembatasan

= 60% x 70 juta

= Rp 42.000.000,-

Pendapatan sumbangan tanpa pembatasan

= (100% - 60%) x 70 juta

= 40% x 70 juta atau 70 juta – 42 juta

= Rp 28.000.000,-

Jurnal			
Tgl	Akun	Debit	Kredit
5 Jan	Kas	70 juta	
	Pendapatan sumbangan dengan pembatasan		42 juta
	Pendapatan sumbangan tanpa pembatasan		28 juta

Langkah 1

Langkah 3

Langkah 2

Langkah 4

Debit = Kredit

70 juta = 42 juta + 28 juta

Transaksi 6 Januari. Diterima sumbangan dari Ikatan Alumni dana sejumlah Rp 8.000.000,- untuk pengembangan fasilitas dapur di lingkungan panti asuhan

Pendapatan sumbangan dari Ikatan Alumni merupakan pendapatan sumbangan dengan pembatasan karena difokuskan untuk pengembangan fasilitas dapur panti asuhan. Maka akun pendapatan sumbangan dengan pembatasan akan menambah

di sisi kredit sebesar Rp 8.000.000,- Sementara kas menambah di sisi debit sebesar Rp 8.000.000,-

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
6 Jan	Kas	8.000.000	
	Pendapatan sumbangan dengan pembatasan		8.000.000

Transaksi 7 Januari. Dibayarkan gaji staf dan karyawan sebesar Rp 9.000.000,-

Pembayaran gaji staf dan karyawan akan mengurangi kas yayasan sehingga kas berada di sisi kredit sebesar Rp 9.000.000,- Dan akan menambah beban gaji staf dan karyawan di sisi debit sebesar Rp 9.000.000,-

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
7 Jan	Beban Gaji Staf dan Karyawan	9.000.000	
	Kas		9.000.000

Transaksi 11 Januari. Yayasan menyelenggarakan kegiatan seminar pendidikan yang dilaksanakan di Hotel Indah dengan total biaya yang dibayarkan

pada pihak hotel sebesar Rp 4.500.000,- (pembicara/pemateri tidak dibayar-gratis)

Pembayaran kepada pihak hotel jelas akan mengurangi kas yayasan sehingga kas berada di sisi kredit sebesar Rp 4.500.000,- Sementara beban rapat bertambah sehingga berada di sisi debit sebesar Rp 4.500.000,-

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
11 Jan	Beban Rapat	4.500.000	
	Kas		4.500.000

Transaksi 12 Januari. Diterima uang pendaftaran dari peserta seminar pendidikan sebesar Rp 2.000.000,-

Pendapatan dari uang pendaftaran tersebut akan menambah kas yayasan sehingga kas berada di sisi debit sebesar Rp 2.000.000,- Pendapatan atas pendaftaran peserta seminar tersebut termasuk pendapatan sumbangan tanpa pembatasan karena tidak ada syarat yang melekat dari pendapatan tersebut. Pendapatan sumbangan tanpa pembatasan akan menambah di sisi kredit sebesar Rp 2.000.000,-

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
12 Jan	Kas	2.000.000	
	Pendapatan sumbangan tanpa pembatasan		2.000.000

Transaksi 13 Januari. Yayasan membeli tunai sebuah motor untuk kendaraan operasional senilai Rp 10.000.000,-

Pembelian motor merupakan kegiatan menambah aset tetap namun akan mengurangi kas yayasan karena pembelian dilakukan secara tunai. Maka kas berada di sisi kredit dan aset tetap-motor berada di sisi debit sebesar Rp 10.000.000,-

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
13 Jan	Aset Tetap – Motor	10.000.000	
	Kas		10.000.000

Transaksi 15 Januari. Dibayarkan tunai biaya sewa gedung sebagai kantor sekretariat yayasan untuk 2 tahun kedepan, total biaya sewa Rp 15.000.000,-

Sewa dibayar dimuka termasuk dalam aset. Dalam contoh kasus, aset yang diperoleh atas pembayaran kas adalah sewa gedung untuk jangka waktu 2 tahun. Maka, sewa dibayar dimuka akan menambah di sisi debit sebesar Rp 15.000.000,- Sementara kas akan berkurang di sisi kredit sebesar Rp 15.000.000,-

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
15 Jan	Sewa dibayar dimuka	15.000.000	
	Kas		15.000.000

Transaksi 20 Januari. Diterima sumbangan dari perkumpulan alumni yayasan sebesar Rp 50.000.000,- dan tidak dibatasi penggunaannya (sepanjang untuk kegiatan yayasan)

Pendapatan dari sumbangan tersebut akan menambah kas yayasan sehingga kas berada di sisi debit sebesar Rp 50.000.000,- Pendapatan sumbangan tersebut termasuk dalam pendapatan sumbangan tanpa pembatasan karena penggunaannya tidak dibatasi. Sehingga diterimanya sumbangan tersebut akan menambah akun pendapatan sumbangan tanpa pembatasan di sisi kredit sebesar Rp 50.000.000

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
20 Jan	Kas	50.000.000	
	Pendapatan sumbangan tanpa pembatasan		50.000.000

Transaksi 23 Januari. Dibayar tagihan listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.500.000,-

Pembayaran atas tagihan listrik, air, dan telepon akan mengurangi kas yayasan sehingga akun kas berada di sisi kredit sebesar Rp 1.500.000,- Sementara akun beban listrik, air, dan telepon akan bertambah dan berada di sisi debit sebesar Rp 1.500.000,-

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
23 Jan	Beban listrik, air, dan telepon	1.500.000	
	Kas		1.500.000

Transaksi 25 Januari. Dibeli alat tulis kantor untuk perlengkapan administrasi yayasan 2 bulan kedepan sebesar Rp 2.000.000

Transaksi ini akan meningkatkan akun aset yaitu persediaan ATK, sehingga persediaan ATK didebit sebesar Rp 2.000.000,- Dan kas berkurang atas

pembayaran ATK tersebut sehingga kas dikredit sebesar Rp 2.000.000

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
25 Jan	Persediaan ATK	2.000.000	
	Kas		2.000.000

Transaksi 30 Januari. Mengadakan rapat pertemuan dengan dinas sosial dengan total biaya sebesar Rp 3.000.000,-

Transaksi ini akan menambah beban rapat namun akan mengurangi kas yayasan. Maka kas berada di sisi kredit sementara beban rapat di sisi debit sebesar Rp Rp 3.000.000,-

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
30 Jan	Beban Rapat	3.000.000	
	Kas		3.000.000

Transaksi 31 Januari. Menerima sumbangan berupa 2 unit komputer dari donatur perusahaan, dengan perkiraan nilai sebesar Rp 9.000.000,- Komputer tersebut ditujukan untuk mendukung pendidikan anak asuh.

Perusahaan menerima sumbangan dalam bentuk fisik yaitu 2 unit komputer, sehingga akan menambah aset tetap sehingga akun aset tetap-komputer di sisi debit sebesar perkiraan nilai aset tersebut yaitu Rp 9.000.000,- Pendapatan sumbangan tersebut termasuk pendapatan sumbangan dengan pembatasan karena penggunaannya ditujukan untuk mendukung pendidikan anak asuh. Pendapatan sumbangan dengan pembatasan akan bertambah di sisi kredit sebesar Rp 9.000.000

Tanggal	Akun	Debit	Kredit
31 Jan	Aset Tetap - Komputer	9.000.000	
	Pendapatan sumbangan dengan pembatasan		9.000.000

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jurnal umum untuk semua transaksi selama bulan Januari dicatat sebagai berikut

Tgl	Akun	Debit	Kredit
5 Jan	Kas	70.000.000	
	Pendapatan Sumbangan-dgn pembatasan		42.000.000
	Pendapatan Sumbangan-tanpa pembatasan		28.000.000
6 Jan	Kas	8.000.000	
	Pendapatan Sumbangan-dgn pembatasan		8.000.000
7 Jan	Beban Gaji Staf dan Karyawan	9.000.000	
	Kas		9.000.000
11 Jan	Beban Rapat	4.500.000	
	Kas		4.500.000
12 Jan	Kas	2.000.000	
	Pendapatan Sumbangan-tanpa pembatasan		2.000.000
13 Jan	Aset tetap-Motor	10.000.000	
	Kas		10.000.000

15 Jan	Sewa Dibayar Dimuka	15.000.000	
	Kas		15.000.000
20 Jan	Kas	50.000.000	
	Pendapatan Sumbangan-tanpa pembatasan		50.000.000
23 Jan	Beban Listrik, Air, dan Telepon	1.500.000	
	Kas		1.500.000
25 Jan	Persediaan ATK	2.000.000	
	Kas		2.000.000
30 Jan	Beban Rapat	3.000.000	
	Kas		3.000.000
31 Jan	Aset tetap - Komputer	9.000.000	
	Pendapatan Sumbangan dgn pembatasan		9.000.000

MEMINDAHKAN AYAT JURNAL KE DALAM BUKU BESAR

Transaksi pertama kali dicatat kedalam jurnal. Selanjutnya, ayat jurnal tersebut secara periodik dimasukkan ke akun-akun dalam buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun-akun sejenis berdasarkan transaksi-transaksi yang telah dibuat pada jurnal umum. Proses memindahkan ayat jurnal ke buku besar ini disebut dengan pemindahbukuan atau posting.

Langkah memindahkan ayat jurnal kedalam buku besar, adalah sebagai berikut

- 1. Memasukkan tanggal transaksi ke dalam tanggal pada akun buku besar*
- 2. Memasukkan jumlah transaksi ke kolom debit atau kredit pada akun buku besar*
- 3. Memasukkan saldo (saldo sebelumnya ditambah jumlah transaksi pada tanggal tersebut)*

Tgl	Akun	Debit	Kredit
5 Jan	Kas	70.000.000	
	Pendapatan Sumbangan-dengan pembatasan		42.000.000
	Pendapatan Sumbangan-tanpa pembatasan		28.000.000
6 Jan	Kas	8.000.000	
	Pendapatan Sumbangan-dengan pembatasan		8.000.000
7 Jan	Beban Gaji	9.000.000	
	Kas		9.000.000

Akun Kas			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
05 Jan	70.000.000		70.000.000
06 Jan	8.000.000		78.000.000
07 Jan		9.000.000	69.000.000

Langkah 1
Langkah 3

Langkah 2

Buku Besar

Akun Kas			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
05 Jan	70.000.000		70.000.000
06 Jan	8.000.000		78.000.000
07 Jan	-	9.000.000	69.000.000
11 Jan	-	4.500.000	64.500.000
12 Jan	2.000.000		66.500.000
13 Jan	-	10.000.000	56.500.000
15 Jan	-	15.000.000	41.500.000
20 Jan	50.000.000		91.500.000
23 Jan	-	1.500.000	90.000.000
25 Jan	-	2.000.000	88.000.000
30 Jan	-	3.000.000	85.000.000

Akun Aset Tetap-Motor			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
13 Jan	10.000.000		10.000.000

Akun Aset Tetap-Komputer			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
31 Jan	9.000.000		9.000.000

Akun Persediaan ATK			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
25 Jan	2.000.000		2.000.000

Akun Sewa Dibayar Dimuka			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
15 Jan	15.000.000		15.000.000

Akun Pendapatan Sumbangan – dgn pembatasan			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
05 Jan		42.000.000	42.000.000
06 Jan		8.000.000	50.000.000
31 Jan		9.000.000	59.000.000

Akun Pendapatan Sumbangan – tanpa pembatasan			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
05 Jan		28.000.000	28.000.000
12 Jan		2.000.000	30.000.000
31 Jan		50.000.000	80.000.000

Akun Beban Gaji Staf dan Karyawan			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
07 Jan	9.000.000		9.000.000

Akun Beban Rapat			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
11 Jan	4.500.000		4.500.000
30 Jan	3.000.000		7.500.000

Akun Beban Listrik, Air, dan Telepon			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
23 Jan	1.500.000		1.500.000

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

MEMBUAT LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Laporan penghasilan komprehensif adalah laporan yang menyajikan ringkasan pendapatan dan beban dalam suatu periode waktu tertentu. Melalui laporan ini dapat diperoleh selisih antara pendapatan terhadap beban yang terjadi selama periode berjalan. Jika pendapatan lebih besar daripada beban maka disebut surplus atau laba neto. Sebaliknya jika beban melebihi pendapatan maka selisihnya disebut defisit atau rugi neto. Adapun langkah-langkah dalam menyusun laporan penghasilan komprehensif adalah sebagai berikut.

- 1. Langkah 1. Menuliskan nama perusahaan diikuti dengan judul "Laporan Penghasilan Komprehensif" dan periode waktu terkait*
- 2. Langkah 2. Menuliskan akun-akun yang termasuk dalam pendapatan dan biaya*
- 3. Langkah 3. Mengurangi jumlah pendapatan dan biaya untuk menentukan selisih surplus/defisit*

Dalam kasus Yayasan ABC, yayasan memiliki 2 macam sumber pendapatan, yaitu pendapatan

sumbangan tanpa pembatasan dari pemberi kerja dan pendapatan sumbangan dengan pembatasan dari pemberi kerja. Sementara beban yang terjadi selama bulan Januari meliputi beban gaji staf dan karyawan, beban rapat, dan beban listrik, air, telepon. Ringkasan laporan laba rugi ditunjukkan pada tampilan dibawah ini:

Yayasan ABC	
Laporan Penghasilan Komprehensif	
Per 1-31 Januari 20x1	
Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
Pendapatan	
Sumbangan	80.000.000
Total Pendapatan	80.000.000
Beban	
Gaji Staf dan Karyawan	9.000.000
Beban Rapat	7.500.000
Beban Listrik, Air, dan Telepon	1.500.000
Total Beban	18.000.000
Surplus (Defisit)	62.000.000

Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
Sumbangan	59.000.000
Total Pendapatan	59.000.000
Surplus (Defisit)	121.000.000

Jumlah pendapatan dan beban-beban diperoleh dari saldo akhir pada buku besar masing-masing akun. Misalnya Pendapatan sumbangan tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya sebesar Rp 80.000.000,- dan pendapatan sumbangan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya sebesar Rp 59.000.000,- diperoleh dari saldo akhir pada akun buku besar pendapatan sumbangan tanpa pembatasan dan buku besar pendapatan sumbangan dengan pembatasan. Begitupun dengan beban-beban.

Akun Pendapatan Sumbangan – dgn pembatasan			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
05 Jan		42.000.000	42.000.000
06 Jan		8.000.000	50.000.000
31 Jan		9.000.000	59.000.000

Akun Pendapatan Sumbangan – tanpa pembatasan			
05 Jan		28.000.000	28.000.000
12 Jan		2.000.000	30.000.000
31 Jan		50.000.000	80.000.000
31 Jan		50.000.000	80.000.000

Akun Beban Gaji Staf dan Karyawan			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
07 Jan	9.000.000		9.000. 000

Akun Beban Rapat			
11 Jan	4.500.000		4.500.000
30 Jan	3.000.000		7.500.000

Akun Beban Listrik, Air, dan Telepon			
23 Jan	1.500.000		1.500.000

MEMBUAT LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Laporan perubahan aset neto adalah adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai saldo akhir dari aset neto, baik aset neto tanpa pembatasan maupun aset neto dengan pembatasan dari pemberi sumber daya. Saldo akhir ini didapat dari penjumlahan antara aset neto dengan surplus atau defisit dari aset neto tersebut pada periode berjalan. Laporan perubahan aset nato Yayasan ABC ditunjukkan pada tampilan dibawah ini.

Yayasan ABC

Laporan Perubahan Aset Neto

Per 31 Januari 20x1

Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Kerja	
Aset neto tanpa pembatasan	-
Surplus bulan berjalan	62.0000.000
Saldo Akhir	62.000.0000
Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Kerja	

Aset neto dengan pembatasan	-
Surplus bulan berjalan	59.000.000
Saldo Akhir	59.000.000
Total Aset Neto	121.000.000

Dalam kasus Yayasan ABC, anggap bahwa aset neto pada periode sebelumnya adalah 0 (nol). Sehingga saldo akhir aset neto tanpa pembatasan adalah 0 (nol) ditambah surplus atau defisit pada bulan berjalan. Dalam hal ini, bulan Januari mengalami surplus sebesar Rp 62.000.000,- yang diperoleh dari laporan penghasilan komprehensif. Begitupun dengan saldo akhir aset neto dengan pembatasan yaitu 0 (nol) ditambah surplus pada laporan penghasilan komprehensif dengan pembatasan sebesar Rp 59.000.000,- Oleh karena itu, total aset neto per 31 Januari 20x1 yaitu Rp 121.000.000,-

Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
Pendapatan	
Sumbangan	80.000.000
Total Pendapatan	80.000.000

Beban	
Gaji Staf dan Karyawan	9.000.000
Beban Rapat	7.500.000
Beban Listrik, Air, dan Telepon	1.500.000
Total Beban	18.000.000
Surplus (Defisit)	62.000.000
Dengan Pembatasan dari Pemberi Sumber Daya	
Sumbangan	59.000.000
Total Pendapatan	59.000.000
Surplus (Defisit)	59.000.000

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

MEMBUAT LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas yaitu laporan yang berisi ringkasan penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. 3 elemen dalam arus kas meliputi:

1. *Aktivitas operasi, yaitu aktivitas terkait dengan operasional perusahaan yang umumnya berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba atau rugi bersih perusahaan. Misalnya penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa, pembayaran gaji karyawan, pembayaran hutang, dan pembayaran beban operasional lainnya*
2. *Aktivitas investasi, yaitu aktivitas terkait penambahan atau pelepasan aset non kas. Misalnya pembayaran kas untuk pembelian aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, penjualan tanah, bangunan, peralatan dan aktiva jangka panjang lainnya*
3. *Aktivitas pendanaan, yaitu aktivitas terkait penerimaan atau pembayaran modal. Misalnya penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen saham, pembayaran kas kepada pemegang saham, dan pembayaran untuk pelunasan pinjaman*

Langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas adalah sebagai berikut:

1. *Menuliskan nama perusahaan diikuti dengan judul "Laporan Arus Kas" dan periode penyajian*
2. *Menuliskan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi beserta jumlahnya*
3. *Menuliskan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas investasi beserta jumlahnya*
4. *Menuliskan arus kas masuk dan keluar dari aktivitas keuangan beserta jumlahnya*
5. *Jumlahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan keuangan untuk mencari kenaikan atau penurunan bersih kas*
6. *Masukkan jumlah kas pada awal periode*
7. *Jumlahkan kenaikan (penurunan) bersih kas dengan kas pada awal periode untuk mendapatkan kas pada akhir periode*

Dalam kasus Yayasan ABC, arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari penerimaan sumbangan, pembayaran atas gaji staf dan karyawan, rapat, listrik, air, dan telepon, serta pembayaran atas pembelian

ATK. Adapun arus kas dari aktivitas investasi meliputi pembayaran atas pembelian motor dan sewa gudang. Sementara aktivitas pendanaan tidak terdapat dalam kasus Yayasan ABC, sehingga arus kas dari aktivitas pendanaan 0 (nol)

Yayasan ABC

Laporan Arus Kas

Per 31 Januari 20x1

Arus Kas Aktivitas Operasi	
Sumbangan dengan pembatasan	50.000.000
Sumbangan tanpa pembatasan	80.000.000
Beban Gaji dan Staf Karyawan	(9.000.000)
Beban Rapat	(7.500.000)
Beban Listrik, Air, dan Telepon	(1.500.000)
Pembelian ATK	(2.000.000)
Jumlah Arus Kas Aktivitas Operasi	110.000.000)
Arus Kas Aktivitas Investasi	
Pembelian motor	(10.000.000)
Pembayaran sewa gedung	(15.000.000)
Jumlah Arus Kas Aktivitas Investasi	(25.000.000)

Arus Kas Aktivitas Pendanaan	
Jumlah Arus Kas Aktivitas Pendanaan	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	85.000.000
Kas Awal Periode	-
Kas Akhir Periode	85.000.000

MEMBUAT LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan jumlah aset, liabilitas, dan aset neto atau ekuitas pemilik. Adapun langkah-langkah dalam menyusun laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut.

- 1. Langkah 1. Menuliskan nama perusahaan diikuti dengan judul "Laporan Posisi Keuangan" dan periode penyajian*
- 2. Langkah 2. Menuliskan semua akun-akun yang ada beserta saldonya*
- 3. Langkah 3. Menjumlahkan semua akun-akun yang termasuk dalam aset*
- 4. Langkah 4. Menjumlahkan semua akun-akun yang termasuk dalam liabilitas dan aset neto*
- 5. Langkah 5. Pastikan jumlah aset sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas (balance)*

Aset Yayasan ABC dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar yaitu aset yang dapat diuangkan dalam jangka waktu pendek

yaitu kurang dari satu tahun. Aset lancar yayasan terdiri dari kas, persediaan ATK, dan sewa dibayar dimuka. Sementara aset tidak lancar adalah aset yang tidak dapat diuangkan dalam waktu dekat. Aset tidak lancar yang dimiliki yayasan terdiri dari motor dan komputer. Jumlah atau nominal masing-masing aset tersebut dapat diperoleh dari saldo akhir pada buku besar. Misalnya, buku besar kas memiliki saldo akhir sebesar Rp 85.000.000,- Persediaan ATK memiliki saldo akhir Rp 2.000.000,- dan sewa dibayar dimuka memiliki saldo akhir Rp 15.000.000, maka jumlah itu yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan.

Akun Kas			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
05 Jan	70.000.000		70.000.000
06 Jan	8.000.000		78.000.000
07 Jan	-	9.000.000	69.000.000
11 Jan	-	4.500.000	64.500.000
12 Jan	2.000.000		66.500.000
13 Jan	-	10.000.000	56.500.000
15 Jan	-	15.000.000	41.500.000
20 Jan	50.000.000		91.500.000
23 Jan	-	1.500.000	90.000.000

25 Jan	-	2.000.000	88.000.000
30 Jan	-	3.000.000	85.000.000

Akun Beban Listrik, Air, dan Telepon			
Tgl	Debit	Kredit	Saldo
23 Jan	1.500.000		1.500.000

Yayasan ABC tidak memiliki utang sehingga liabilitas pada laporan posisi keuangan nol (0). Adapun aset neto yayasan dapat diperoleh dari laporan perubahan aset neto yang telah dibuat sebelumnya. Saldo akhir aset neto dengan pembatasan dari pemberi kerja sebesar Rp 62.000.000,- sementara saldo akhir aset neto tanpa pembatasan dari pemberi kerja sebesar Rp 59.000.000,- Sehingga total aset neto Yayasan ABC per bulan Januari 20x1 sebesar Rp 121.000.000,-

Aset Neto Tanpa Pembatasan dari Pemberi Kerja	
Aset neto tanpa pembatasan	-
Surplus bulan berjalan	62.0000.000
Saldo Akhir	62.000.0000
Aset Neto Dengan Pembatasan dari Pemberi Kerja	

Aset neto dengan pembatasan	-
Surplus bulan berjalan	59.000.000
Saldo Akhir	59.000.000

Yayasan ABC
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Januari 20x1

Aset	
Aset Lancar	
Kas	85.000.000
Persediaan ATK	2.000.000
Sewa Dibayar Dimuka	15.000.000
Total Aset Lancar	102.000.000
Aset Tidak Lancar	
Motor	10.000.000
Komputer	9.000.000
Total Aset Tidak Lancar	19.000.000
Total Aset	121.000.000

Liabilitas	
Liabilitas Jangka Pendek	-
Liabilitas Jangka Panjang	-
Total Liabilitas	-
Aset Neto	
Tanpa Pembatasan	62.000.000
Dengan Pembatasan	59.000.000
Total Aset Neto	121.000.000
Total Liabilitas dan Ekuitas	121.000.000

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

CONTOH LAPORAN SPT TAHUNAN BADAN

Saat ini, pelaporan SPT Tahunan baik Orang Pribadi maupun Badan dilakukan secara *online* melalui e-filing. Berikut adalah langkah-langkah pelaporan SPT Tahunan Badan secara online berdasarkan kasus Yayasan ABC

1. *Login akun DJP online melalui website www.djponline.go.id dengan memasukkan NPWP dan kata sandi, serta kode captcha*
2. *Klik "Lapor" lalu klik "e-Form"*
3. *Klik "Buat SPT" lalu pilih tahun pajak yang akan dilaporkan, kemudian klik "Kirim Permintaan" Otomatis akan ter-download e-form SPT 1771*
4. *Buka e-form yang telah terdownload menggunakan adobe acrobat reader*
5. *Isi data-data pada e-form (SPT Induk dan lampiran-lampiran)*
6. *Jika semua data sudah dimasukkan, klik "kirim" di pojok kanan atas SPT Induk Lanjutan*

7. Unggah lampiran laporan keuangan
8. Masukkan kode verifikasi yang telah terkirim melalui email lalu klik "Submit"
9. SPT telah dilaporkan dan BPE akan dikirimkan melalui email atau dilihat pada akun DJP online pada bagian arsip SPT

Lampiran VI (jika ada)

Lampiran ini berisi daftar penyertaan modal, utang dan piutang dari dan kepada pemegang saham atau perusahaan afiliasi. Penyertaan modal, utang dan piutang yang dicantumkan adalah yang memenuhi hubungan istimewa. Dalam kasus Yayasan ABC, tidak ada penyertaan modal, utang, dan piutang yang dimaksud. Maka Yayasan ABC tidak perlu mengisi lampiran ini

Lampiran V

Lampiran ini berisi daftar pemegang saham dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Yayasan ABC tidak memiliki daftar pemegang saham sehingga bagian itu dapat diabaikan, sementara daftar susunan pengurus dan komisaris adalah sebagai berikut

Bagian A : Daftar Pemegang Saham / Pemilik Modal dan Jumlah Dividen yang Dibagikan

No	Nama	Alamat	NPWP	Jumlah Modal Disetor		Dividen
				Rupiah	%	Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Bagian B : Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Budi Artanto	Jalan Mawar No. 20 Semarang	01.234.567.8.503.000	Komisaris
2.	Adi Perdana	Jalan Pandawa No. 5 Semarang	01.456.789.1.503.000	Direktur

Lampiran IV (jika ada)

Lampiran ini berisi penghasilan tertentu yang dikenakan final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam kasus Yayasan ABC,

terdapat sumbangan sebesar Rp 137.000.000,- yang merupakan penghasilan tidak termasuk objek pajak. PMK No. 90/PMK.03/2020 tentang Bantuan/ Sumbangan serta Harta Hibahan yang dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan mengatur bahwa salah satu sumbangan yang bukan objek pajak adalah bantuan kepada badan sosial termasuk yayasan non profit yang memiliki kegiatan utama memelihara kesehatan, yatim piatu, orang lanjut usia, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Yayasan ABC merupakan badan sosial sehingga sumbangan yang diterima oleh Yayasan tidak termasuk objek pajak dan dimasukkan dalam lampiran IV Bagian B pada SPT 1771. Adapun rincian sumbangan tersebut sebagai berikut:

Sumbangan /Bantuan	Jumlah
Sumbangan dari Pemerintah Daerah	Rp 70.000.000
Sumbangan dari Ikatan Alumni	Rp 8.000.000
Sumbangan dari Alumni Yayasan	Rp 50.000.000
Sumbangan dari Donatur Perusahaan	Rp 9.000.000
Jumlah Sumbangan (lamp IV)	Rp 137.000.000

Bagian A : PPh Final

No	Jenis Penghasilan	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	PPh Terutang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Bagian B : Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

No	Jenis Penghasilan	Penghasilan Bruto
(1)	(2)	(3)
1.	Bantuan / Sumbangan	Rp 137.000.000

Lampiran III (jika ada)

Lampiran ini berisi kredit pajak atau rincian bukti pemotongan/pemotongan PPh Pasal 22, 23, dan 26 yang telah dipotong/dipungut pihak lain dan telah dibayar sendiri oleh wajib pajak. Dalam kasus Yayasan ABC, tidak ada kredit pajak dalam negeri sehingga Yayasan tidak perlu mengisi lampiran ini.

Lampiran II

Lampiran 2 dalam SPT Tahunan Badan berisi tentang rincian harga pokok penjualan (HPP), biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial. Biaya yang tertera dalam Laporan Laba Rugi Yayasan ABC antara lain Biaya Gaji yang kemudian akan dimasukkan ke dalam perincian nomor 2 dan biaya lainnya akan dimasukkan ke dalam perincian no 11. Berikut pengisian lampiran II pada kasus Yayasan ABC.

No	Perincian	HPP (Rp)	Biaya Usaha Lain (Rp)	Biaya dari Luar Usaha (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Gaji, Upah, dsb		9.000.000		9.000.000
11	Biaya Lainnya		9.000.000		9.000.000
14	Jumlah		18.000.000		18.000.000

Lampiran I

Lampiran 1 pada SPT Tahunan Badan berisi tentang penghitungan Penghasilan Neto Fiskal. Penghasilan Neto Fiskal tersebut diperoleh melalui pengurangan dari seluruh jumlah Penghasilan Neto Komersial dari dalam dan luar negeri dengan Penyesuaian Fiskal Positif dan Negatif. Berikut pengisian lampiran I pada kasus Yayasan ABC

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri	
	Peredaran Usaha	139.000.000
	Biaya Usaha Lainnya	18.000.000
	Penghasilan Neto dari Usaha (a-b)	121.000.000
2	Penghasilan Neto Komersial	121.000.000
3	Penyesuaian Fiskal Positif Negatif	0
4	Penghasilan Neto Fiskal	121.000.000

SPT Induk

SPT Induk pada SPT Tahunan Badan berisi perhitungan pajak terutang badan usaha dan yang terutama adalah identitas jelas badan usaha sebagai Wajib Pajak. Berikut pengisian SPT Induk pada kasus Yayasan ABC :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penghasilan Neto Fiskal	121.000.000
2	Penghasilan Kena Pajak	121.000.000
3	Pajak Terutang	13.310.000

Perhitungan PPh terutang wajib pajak badan dibagi menjadi 3, yaitu

- a. *Peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar*

Dikenakan tarif sebesar

$50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$

Contoh

Peredaran bruto tahun 2022 sebesar Rp 4 miliar

PKP tahun 2022 sebesar Rp 400 juta rupiah

PPh terutang = $50\% \times 22\% \times \text{Rp } 400.000.000$

= Rp 44.000.000,-

- b. *Peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar*

$$\begin{array}{l} \text{PPh} \\ \text{terutang} \end{array} = (50\% \times 22\%) + 22\% \times \text{PKP} \\ \text{x PKP yang} \quad \text{yang tidak} \\ \text{memperoleh} \quad \text{memperoleh} \\ \text{fasilitas} \quad \text{fasilitas}$$

Perhitungan PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$\begin{array}{l} \text{PKP} \\ \text{memperoleh} \\ \text{fasilitas} \end{array} = \frac{4.800.000.000}{\text{Peredaran} \\ \text{Bruto}} \times \begin{array}{l} \text{Penghasilan} \\ \text{Kena} \\ \text{Pajak} \end{array}$$

Contoh

Peredaran bruto tahun 2022 sebesar Rp 32 miliar

PKP tahun 2022 sebesar Rp 3 miliar

$$\begin{array}{l} \text{PKP} \\ \text{memperoleh} \\ \text{fasilitas} \end{array} = \frac{4.800.000.000}{32.000.000.000} \times 3.000.000.000 \\ = \text{Rp } 450.000.000$$

$$\begin{array}{l} \text{PKP tidak} \\ \text{memperoleh} \\ \text{fasilitas} \end{array} = \text{Rp } 3.000.000.000 - \text{Rp } 450.000.000 \\ = \text{Rp } 2.550.000.000$$

c. *Peredaran bruto lebih dari 50 miliar*

Dikenakan tarif sebesar 22% x Penghasilan Kena Pajak (tahun 2022)

Contoh :

Peredaran bruto tahun 2022 sebesar Rp 52 miliar

PKP tahun 2022 sebesar Rp 5 miliar

$$\begin{aligned}\text{PPH terutang} &= 22\% \times \text{Rp } 5.000.000.000,- \\ &= \text{Rp } 1.100.000.000,-\end{aligned}$$

Yayasan ABC memiliki peredaran bruto sebesar Rp 121.000.000, maka perhitungan PPh terutang menggunakan cara (1) yaitu sebagai berikut

$$\begin{aligned}\text{PPH terutang} &= 50\% \times 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= 50\% \times 22\% \times \text{Rp } 121.000.000 \\ &= \text{Rp } 13.310.000,-\end{aligned}$$

PENUTUP

Yayasan sosial merupakan salah satu bentuk entitas yang aktivitasnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun demikian, sebagai lembaga berbadan hukum yang memiliki NPWP, yayasan sosial tetap harus melaksanakan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Sebagai wajib pajak badan, yayasan juga berkewajiban melakukan pembukuan keuangan yang kemudian akan dilampirkan pada laporan SPT Tahunan. Dari buku saku ini, telah dijelaskan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi Yayasan Sosial dengan harapan dapat membantu proses pelaporan keuangan dan perpajakan Yayasan Sosial

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo, Perpajakan 2018, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2016

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ISAK 35

Warren, Carl S dkk, Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2017

Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 2

PER-19/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya

PMK Nomor 90/PMK.03/2010 tentang Bantuan atau Sumbangan serta Harta Hibahan yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
SOEGIJAPRANATA CATHOLIC UNIVERSITY



Shandy Jannifer Matitaputty, S.E., M.Si., adalah dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Mata Kuliah Pengantar Ekonomi, PDRD, PBB, BPHTB, BM, Matematika Bisnis, dan juga Statistika. Selain mengajar, penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian dalam bidang ekonomi pembangunan, kemiskinan, perpajakan, serta pendampingan UMKM



Agnes Arie Mientarry Christie, S.E., M.Si., BKP adalah seorang dosen serta peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Mata Kuliah Pengantar Perpajakan, PPN dan PPnBM, PPh Orang Pribadi dan Badan, Praktik PPN dan PPnBM, Praktik PPh Orang Pribadi dan Badan, serta Kapita Selekt. Selain mengajar, penulis aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian



Paulina Rini Hastuti, S.E., M.Si., adalah pengajar di Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Penulis mengampu mata kuliah Akuntansi Pengantar 1 dan 2, PPh Pemotongan dan Pemungutan, Akuntansi Perpajakan, Praktik PPh Pemotongan dan Pemungutan serta Kapita Selekt. Selain mengajar, penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian di dibidang perpajakan



Agung Sugiarto, S.E., MM., M.Ec.Dev., Ak., CA., CPA., MAPPI (Cert), CRBC adalah seorang dosen di Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. Mengampu mata kuliah Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan 2, Kewirausahaan, Praktik Akuntansi serta Sistem Informasi Akuntansi. Selain mengajar, penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian di bidang akuntansi dan perpajakan



Apelina Teresia, S.Ak., M.Ak adalah seorang dosen pengajar di Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata sejak Mei 2022. Selain itu, penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian dalam bidang akuntansi dan perpajakan



Mardika Mariana adalah seorang mahasiswa S1 Tax Accounting Unika Soegijapranata angkatan tahun 2020. Dan **Feronika Roselin Lalang** mahasiswa D3 Perpajakan Unika Soegijapranata angkatan tahun 2020. Mereka aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kepanitian. Juga membantu dalam berbagai penelitian dan pengabdian.